

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Para penganut '*state-centered approach*' berpandangan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting didalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kekuasaan yang sangat penting di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, negara bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang menjadi jangkauannya, bahkan tidak sekedar kebijakan makro seperti kebijakan moneter dan fiscal. Kebijakan-kebijakan industri, seperti pemberian bunga rendah dan *tax holiday* kepada para industri strategis. Negara bahkan turut serta sebagai pelaku ekonomi langsung dalam berbagai sektor strategis, terutama dalam konteks negara berkembang.<sup>1</sup>

Friedrich list, salah satu pemikir yang berkontribusi pada pendekatan ini, menekankan bahwa negara memiliki peran penting untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju melalui intervensi aktif, khususnya dalam pembangunan industri manufaktur yang hanya dapat berkembang jika didukung oleh kekuatan negara.<sup>2</sup> Dalam konteks inilah muncul teori negara pembangunan (*developmental state*), yang dikembangkan lebih lanjut oleh Adrian Leftwich. Menurut Leftwich, negara pembangunan adalah negara yang memiliki tingkat kekuasaan, otonomi, dan kapasitas yang cukup untuk merancang dan melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan secara eksplisit, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun kemitraan strategis dengan aktor non-negara.<sup>3</sup>

Namun, di era globalisasi ini, bukan hanya negara yang memiliki peran dalam pembangunan, tetapi juga sektor swasta. Perusahaan, khususnya yang bergerak dalam sektor industri ekstraktif seperti pertambangan, dituntut tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini dikenal dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan, yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* yaitu *Profit, People, and Planet*.<sup>4</sup>

PT Vale Indonesia Tbk, sebagai salah satu perusahaan pertambangan nikel terbesar di Indonesia, menjadi contoh konkret dari peran aktor bisnis dalam pembangunan daerah. PT Vale beroperasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan telah beraktivitas di wilayah ini sejak tahun 1968. Perusahaan ini

---

<sup>1</sup> Peter Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation* (Princeton: Princeton University Press, 1995) hal 12-15

<sup>2</sup> Friedrich List, *The National System of Political Economy* (London: Longmans, Green and Co., 1841/1904) hal 130-135

<sup>3</sup> Adrian Leftwich, *States of Development: On the Primary of Politics in Development* (Cambridge: Polity Press, 2000) hal 154-156

<sup>4</sup> John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21<sup>st</sup> Century Business* (Oxford: Capstone, 1997) hal 70-72

memiliki konsesi tambang yang sangat luas, yaitu sekitar 118.017 hektare berdasarkan Kontrak Karya generasi pertama yang diperpanjang hingga tahun 2045.<sup>5</sup> Dengan skala operasi sebesar ini, PT Vale memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat lokal, terutama di wilayah lingkaran tambang seperti Desa Soroako.

Alasan pemilihan PT Vale Indonesia Tbk sebagai objek penelitian didasarkan pada posisi strategisnya sebagai pelaku utama sektor pertambangan di Indonesia, sekaligus sebagai perusahaan yang menjalankan program CSR cukup besar melalui pendekatan *Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat* (PPM). Data internal PT Vale menunjukkan bahwa pada tahun 2022, perusahaan mengalokasikan lebih dari Rp54,5 miliar untuk berbagai program CSR yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup> Program-program ini dijalankan dengan pendekatan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Adapun pemilihan Desa Soroako sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Desa ini merupakan pusat aktivitas operasional PT Vale dan menjadi kawasan paling terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Desa Soroako menjadi ruang merepresentasikan bagaimana relasi antara negara (pemerintah daerah), bisnis (PT Vale), dan masyarakat lokal terbentuk dan berlangsung dalam rangka implementasi CSR. Di satu sisi, desa ini menikmati pembangunan infrastruktur dan akses sosial yang lebih baik dibanding wilayah lain; namun di sisi lain, muncul pula berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan eksklusi masyarakat adat atau kelompok marginal dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini berangkat dari fenomena paradoks dalam pelaksanaan CSR di sektor ekstraktif, dimana di satu sisi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah sangat dinantikan, namun di sisi lain sering kali terjadi kesenjangan (*gap*) antara ekspektasi masyarakat dan implementasi program yang dilakukan. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa program CSR seringkali bersifat *charity* dan tidak berkelanjutan, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan pembangunan. *Gap* yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah ketidakhadiran model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah sebagai *development state*, perusahaan, dan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi CSR, yang diduga kuat merupakan faktor penyebab tidak optimalnya dampak program tersebut.

Selain kompleksitas sosial dan kesenjangan implementasi, landasan hukum yang mengatur kewajiban CSR di Indonesia juga menjadi pertimbangan utama penelitian ini. Pada tingkat nasional, kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan, khususnya di sektor ekstraktif, telah dimandatkan secara jelas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan ini diperkuat oleh Pasal 15B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan kompensasi akibat

---

<sup>5</sup> PT Vale Indonesia Tbk, *Sustainability Report 2022*, hal 8

<sup>6</sup> PT Vale Indonesia Tbk, *Sustainability Report 2022*, hal 38

dampak penting dari aktivitasnya. Dalam implementasinya di daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan sinergi antara program perusahaan dengan pembangunan berkelanjutan daerah. Lebih spesifik lagi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dimana kegiatan operasi PT Vale Indonesia Tbk di Soroako berlangsung, telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Perbup ini menegaskan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan program TJSL/CSR perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Dengan adanya landasan hukum dari tingkat nasional hingga daerah ini, pelaksanaan CSR tidak lagi bersifat sukarela (*voluntary*) melainkan telah menjadi kewajiban hukum (*mandatory*) yang harus diimplementasikan secara kolaboratif dan accountable. Namun, di lapangan, sering kali terjadi ketidakselarasan antara regulasi yang ada dengan praktik implementasinya, yang menjadi salah satu fokus penelitian ini untuk dikaji lebih dalam.

Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Vale Indonesia Tbk dalam pengelolaan program CSR melalui *Forum Multi-Stakeholder* menjadi praktik yang menarik untuk ditelaah dari perspektif ekonomi-politik, khususnya dalam konteks bagaimana ketiga aktor (negara, bisnis, dan masyarakat) saling berelasi, berkonflik, maupun berkolaborasi dalam proses pembangunan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara kritis bagaimana implementasi CSR PT Vale Indonesia Tbk di Desa Soroako merefleksikan dinamika relasi antara kekuasaan negara, kepentingan korporasi, dan kebutuhan masyarakat, serta sejauh mana program tersebut benar-benar berkontribusi pada pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan menjawab sejumlah pertanyaan kunci terkait implementasi program CSR PT Vale Indonesia Tbk di Desa Soroako. Yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan dinamika relasi antara pemerintah daerah, PT Vale Indonesia Tbk., dan masyarakat dalam implementasi program CSR di Desa Soroako?
2. Bagaimana tingkat partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR PT Vale?
3. Bagaimana dampak program CSR terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat Desa Soroako?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis relasi antara negara, bisnis, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR PT Vale Indonesia di Desa Soroako. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan keterlibatan pemerintah daerah serta masyarakat dalam proses implementasi CSR. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dari pola relasi tersebut terhadap efektivitas program CSR, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, guna melihat sejauh mana program tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik sehingga menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dan program studi ilmu politik.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang peneliti jawab melalui penelitian ini.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam memperkaya referensi tentunya pencarian penelitian terdahulu merupakan bagian dari usaha peneliti untuk mencari sumber data dan menjadikan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu memberikan manfaat untuk menunjukkan urgensi dari sebuah penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Nur Afni Khafsoh (2013), Melakukan Penelitian tentang program kerja pemerintah dan PT Djarum dalam meningkatkan produktifitas Masyarakat, dengan hasil penelitiannya bahwa program pemerintah dan PT Djarum yang selama ini pengrajin bambu masih kurang maksimal karena terhambatnya kebutuhan alat proses produksi lebih cepat yang selama ini dilakukan secara manual.<sup>7</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Hariyani (2011), Melakukan penelitian tentang pengaruh implementasi CSR terhadap profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk. Membuktikan bahwa profit yang diperoleh Perusahaan setelah melakukan CSR lebih profitable dibandingkan sebelum melakukan CSR. Hal ini berarti bahwa sebelum Perusahaan melakukan implementasi CSR lebih mampu dalam memanfaatkan seluruh kekayaan untuk menghasilkan laba dibandingkan sebelum melakukan implementasi CSR<sup>8</sup>.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Aryanto, dkk. (2019) dalam artikel berjudul "*Corporate Social Responsibility (CSR) Strategies of Mining Companies in Developing Countries: A Case Study of Indonesia*" Studi ini berangkat dari pemahaman bahwa industri ekstraktif, khususnya pertambangan, seringkali menghadapi tantangan kompleks berupa tuntutan sosial dan lingkungan yang tinggi dari masyarakat lokal, LSM, dan pemerintah. Secara spesifik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memetakan landscape strategi CSR di sektor pertambangan Indonesia, namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada perspektif dan strategi yang berasal dari sisi perusahaan (*company-centric*) tanpa mengkaji secara mendalam peran serta dan dinamika aktor-aktor lain, khususnya Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan regulator.

---

<sup>7</sup> Khafsoh Nur Afni, *Dalam Program Kerja Pemerintah dan PT Djarum dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa Solo Paliyan Gunung Kidul Yogyakarta*, 2013

<sup>8</sup> Hariyani, *Dalam Pengaruh Implementasi CSR Terhadap Profitabilitas PT Unilever Indonesia Tbk*, 2011

Dari penelitian diatas, persamaan penelitian ini adalah titik fokus yang sama-sama membahas tentang implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dimana dari segi metode, sasaran atau penekanan. Penelitian ini juga fokus mengkaji dalam perspektif ekonomi politik dimana melalui penelitian ini ingin melihat bagaimana Perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) yang bekerjasama dengan pemerintah.

## 2.2 Negara dan Pasar

Sejarah kebijakan ekonomi politik Pembangunan orde baru pada dasarnya adalah Sejarah persaingan antara pendukung pendekatan Politik sebagai panglima (PSP) yang menekan persoalan pembinaan basis materil bagi kekuatan negara dengan pendukung Ekonomi sebagai panglima (ESP), yang menekankan Pembangunan ekonomi sebagai proses akumulasi dan reproduksi kapital dengan pemeran utama actor bisnis swasta.

Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu system besar yang bisa dijalankan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. "*invisible hand*", pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (*self-regulating*) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien<sup>9</sup>.

Keynesian juga melihat bahwa pasar tidak beroperasi sesuai asumsi persaingan sempurna seperti yang dikatakan kaum klasik. Namun, ketidaksempurnaan pasar yang dilihat Keynesian terhadap system ekonomi pasar persaingan sempurna membuat dipertanyakan peran otoritas publik.

Sejak Keynes, campur tangan pemerintah tidak terbatas untuk mengatasi kegagalan pasar sesuai anjuran pakar-pakar Neoklasik. Adanya berbagai kelemahan system pasar persaingan sempurna seperti kecenderungan kearah monopoli, kurangnya perhatian terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung, serta tidak adanya perhatian terhadap pemerataan menyebabkan diperlukannya campur tangan pemerintah. Keperluan akan campur tangan pemerintah semakin kuat pada tahun 60-an di negara-negara berkembang yang baru memerdekakan diri dari penjajah dan ingin mengejar ketertinggalan ekonominya dari negara-negara maju. Di negara-negara berkembang tersebut, pemerintah di harapkan mampu berperan sebagai agen Pembangunan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan: Dari Ekonomi Politik Pemberdayaan Rakyat*, (Pustaka Pelajar, 2010) hal 34-37

<sup>10</sup> Drs. Deliamov, M.Sc. *Ekonomi Politik Neoklasik: Dari Ekonomi Politik*, (Erlangga, 2005) hal 58

## 2.3 Teori Collaborative Governance

Teori Collaborative Governance menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai "sebuah pengaturan di mana satu atau lebih badan publik melibatkan pemangku kepentingan non-state secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang kolektif, formal, konsensual, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik".

Dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR) di sektor ekstraktif, teori ini relevan karena program CSR tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab perusahaan semata, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang memerlukan kolaborasi multipihak untuk mencapai kelegitimasian dan keefektifannya. Model Ansell dan Gash (2008) menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dengan beberapa variabel kunci: **(1) Kondisi Awal** yang mencakup ketidakpercayaan antar pihak, konflik sebelumnya, dan ketimpangan sumber daya; **(2) Proses Kolaborasi** yang terdiri dari dialog face-to-face, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama; serta **(3) Faktor Penunjang** seperti kepemimpinan yang fasilitatif dan desain kelembagaan yang jelas. Proses ini dianggap berhasil jika menghasilkan **outcomes** yang substantif (seperti program CSR yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan) dan relasional (seperti meningkatnya kapasitas dan kepercayaan sosial).

Penelitian ini akan menggunakan model ini untuk menganalisis bagaimana interaksi antara perusahaan (sektor swasta), Pemerintah Daerah (sektor publik dalam kapasitasnya sebagai *development state*), dan masyarakat sipil (komunitas, LSM) dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program CSR. Dengan demikian, teori Collaborative Governance tidak hanya berfungsi sebagai lensa analitis tetapi juga sebagai standar normatif untuk menilai sejauh mana tata kelola CSR di lokasi penelitian telah bersifat inklusif, deliberatif, dan efektif dalam menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun menawarkan model yang ideal, penerapan collaborative governance dalam konteks nyata tidak lepas dari kritik dan tantangan, terutama menyangkut dinamika kekuasaan (*power dynamics*) yang timpang antar aktor. Sebagaimana dikritik oleh Purdy (2012), kolaborasi yang terjadi seringkali tidak berada di dalam ruang hampa yang setara; melainkan diwarnai oleh ketidakseimbangan sumber daya, informasi, dan kapasitas antara aktor yang terlibat. Dalam konteks CSR sektor ekstraktif, perusahaan memiliki sumber daya finansial dan ahli yang besar, sementara masyarakat lokal dan bahkan pemerintah daerah seringkali memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga berpotensi menciptakan hubungan yang tidak simetris. Ketimpangan ini dapat memengaruhi seluruh proses kolaborasi, mulai dari kemampuan untuk mempengaruhi agenda, mengontrol proses dialog, hingga menegosiasikan hasil.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sebagai *development state* menjadi krusial tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penyeimbang (*equalizer*) yang memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dan kepentingan publik tidak didominasi oleh kepentingan korporasi. Analisis ini menuntut penelitian untuk tidak hanya melihat kehadiran forum kolaborasi, tetapi juga menguji kualitas deliberasi, tingkat inklusivitas, dan mekanisme yang ada untuk mengatasi kesenjangan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kedalaman analitis yang kritis untuk mengevaluasi apakah kolaborasi yang terjadi

bersifat substantif atau hanya sekedar legitimasi simbolik (*symbolic gesture*) belaka.

## 2.4 Konsep *Development State*

Konsep *Development State* (Negara Pembangunan) menjadi perspektif kunci untuk menganalisis peran pemerintah dalam penelitian ini. Berakar dari pengalaman negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pasca-Perang Dunia II, *development state* merujuk pada suatu model dimana negara memainkan peran intervensionis dan direktif yang kuat dalam memimpin dan mengarahkan proses pembangunan ekonomi, melampaui fungsi tradisional sebagai sekadar regulator (Johnson, 1982). Ciri utama dari *development state* adalah adanya birokrasi yang meritokratik dan otonom (seperti MITI di Jepang) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan industri strategis jangka panjang, serta koalisi yang erat antara negara dengan kalangan bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, konsep ini diadopsi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), yang dalam konteks CSR sektor ekstraktif dituntut untuk bertindak sebagai *local development state*. Ini berarti Pemda tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus aktif memastikan bahwa program CSR yang dijalankan perusahaan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Peran ini meliputi: (1) sebagai regulator yang membuat peraturan turunan untuk memastikan implementasi CSR sesuai dengan UU No. 40/2007 dan Perda; (2) sebagai fasilitator yang menciptakan platform kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan katalisator; dan (3) sebagai katalisator yang mendorong inovasi dan memastikan program CSR memiliki dampak transformatif, bukan hanya bersifat charity. Dengan demikian, perspektif *development state* melengkapi teori *collaborative governance* dengan memberikan pijakan teoritis yang kuat tentang mengapa dan bagaimana pemerintah daerah harus menjadi aktor utama yang memimpin dan mengarahkan kolaborasi multipihak dalam tata kelola CSR untuk hasil pembangunan yang optimal.

## 2.5 Teori Pembangunan

Dalam system ekonomi kapitalis, seperti halnya Pembangunan di Indonesia sekarang, pemerintah tidak dapat melakukan Pembangunan ekonomi sendirian, melainkan harus dibantu oleh sektor swasta. Maka mau tak mau, proses Pembangunan itu sendiri akan melahirkan semacam kelompok pengusaha swasta, yang mau tak mau merupakan kekuatan politik baru.

Menurut Immanuel Wallerstein mengatakan bahwa setiap negara mampu untuk melepaskan diri dari status sebelumnya, tetapi barangkali negara tersebut tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan kapitalis. Hal ini terjadi karena setelah beberapa lama masuk dalam system kapitalis. Di negara berkembang lainnya, kelompok pengusaha (yang sering dihubungkan dengan kelas menengah) sering cukup kuat untuk Bersaing dengan kekuatan pemerintah. Sering juga kelompok pengusaha yang kuat ini sudah terbentuk sebelum pemerintah nasional lahir.

Keadaan di Indonesia agak berlainan, sejak dulu negara merupakan pusat kekuasaan. Tidak terbentuk kelas tuan tanah yang kuat di kalangan pribumi, sehingga Ketika kemerdekaan di Indonesia tercapai pada 1949, tak ada kelas pengusaha yang dapat menyaingi pemerintah. Bahkan kelas pengusaha ini diusahakan dibentuk lagi oleh pemerintah melalui “politik banteng” yakni dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha pribumi untuk memulai usahanya, tapi politik ini mengalami kegagalan.

Sebenarnya tidak terlalu tepat mengatakan tidak ada kelas pengusaha di Indonesia. Ada, yakni dari kelompok orang Indonesia keturunan Cina, yang dikenal dengan istilah nonpri. Bagaimanapun juga secara sosiologis, kelompok nonpri ini harus dibedakan dari kelompok pribumi, karena sifat-sifat dari kelompok yang lahir akibat berkembangnya Sejarah bangsa ini. Salah satu sifat yang terpenting adalah bahwa kelompok nonpri tidak dapat berperan secara penuh dalam bidang politik. Terutama sejak pemerintahan Orde Baru.

Maka apa yang terjadi sungguh menarik. Di satu pihak ada pemerintah yang kuat, yang menguasai kekuatan militer maupun sumberdaya ekonomi, di lain pihak ada semacam kelas pengusaha/menengah yang juga kuat, tapi hanya secara ekonomis tidak politis. Kelas pengusaha yang kebanyakan terdiri dari orang nonpri ini merupakan sektor swasta yang menjalankan roda Pembangunan ekonomi tanpa (atau sedikit sekali) punya pengaruh dalam proses politik. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah sekarang tidak tersaingi oleh munculnya kelas pengusaha swasta.

Bagaimana dengan kelas pengusaha pribumi? Bukankah mereka mulai bermunculan dengan ukuran yang maik lama makin besar? Kenyataan ini memang tak dapat diingkari. Tapi menurut pengamatan saya, paling sedikit sampai dengan saat ini, pengusaha pribumi yang ada sekarang, masih terlalu erat kaitannya dengan pejabat pemerintah, kalau tidak mau dikatakan bahwa pengusaha pribumi sekarang Sebagian besar merupakan perpanjangan dari usaha pejabat pemerintah di sektor swasta. Dengan perkataan lain, ketergantungan pada pejabat pemerintah masih terlalu besar. Dengan demikian, sulit bagi pengusaha pribumi yang ada sekarang untuk menjadi untuk menjadi mandiri sehingga dapat memperjuangkan kepentingan dirinya melalui kegiatan politik.<sup>11</sup>

Alasan mengapa peran negara dalam Pembangunan ini menjadi menarik untuk dibahas di era globalisasi sekarang ini,

- Pertama, globalisasi dalam praktiknya, tidak serta-merta membawa kemakmuran sebagaimana keyakinan kaum neoliberal. Sebaliknya, globalisasi juga membawa akibat-akibat dalam bentuk semakin besarnya jumlah pengangguran, meuasnya kemiskinan, kepentingan sosial dan ekonomi, dan krisis ekonomi. Jika akibat-akibat merusak ini tidak dicari alternatif pemecahannya, dan kelompok-kelompok yang kalah. Dalam

---

<sup>11</sup> Arief Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan: Dari Demokrasi dan Pembangunan* (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006) hal 4-5

kompetisi global ini tidak memperoleh jaminan sosial, maka mereka akan menjadi penghalang bagi berlangsungnya proses globalisasi itu sendiri.

- Kedua, dalam realitasnya globalisasi tidak memarginalkan peran negara sebagaimana keyakinan para pendukung neoliberal. Namun sebaliknya, berlakunya globalisasi dan liberalisasi ekonomi hanya mungkin dilakukan jika negara melakukan intervensi terhadap system tersebut.
- Ketiga, berangkat dari pandangan kedua dengan demikian peran negara-negara tetap dibutuhkan dan pembahasan mengenaiya tetap relevan. Bagaimana negara-negara tetap menjadi sumber pembuatan Keputusan tertinggi dalam batas teritorialnya. Untuk itu intervensi negara diperlukan dalam rangka menjamin berlakunya pasar yang sempurna dan berjalan secara efektif dan efisien meskipun hal tersebut barangkali tidak selalu berhasil.<sup>12</sup>

## 2.6 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Walter Friedlander kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan Kesehatan yang lebih baik dan menurut Gertrude Wilson kesejahteraan sosial adalah kekhawatiran yang diselenggarakan dari semua orang untuk semua orang.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa Langkah strategis untuk memperluas akses Masyarakat pada sumber daya Pembangunan serta menciptakan peluang bagi Masyarakat Tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan, sehingga Masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Selain dari pembangunannya, Upaya yang biasa dilakukan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industri kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan Masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dapat juga dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong Pembangunan, dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Melakukan pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan Masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial Masyarakat dalam segala aspek jasmani, Rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan Masyarakat selain dilakukan subsidi, Pendidikan, dan penyuluhan, juga harus diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan pemukiman layak huni, air bersih, dan Listrik serta prasarana

---

<sup>12</sup> Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme: Dari Meletakkan Kembali Peran Negara*, (Erlangga, 2010) hal 70

pendukung yang harus tersedia seperti jalan dan alat transportasi, dengan sumber daya yang tersedia dilingkungannya.<sup>13</sup>

Terdapat banyak Upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan tujuan Pembangunan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Semua warga bisa berpartisipasi langsung dalam membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam pencapaian kesejahteraan yang direncanakan.

## 2.7 Relasi Negara, Bisnis, dan Masyarakat

Dalam memahami implementasi program CSR PT Vale Indonesia di Desa Soroako, pendekatan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi negara, bisnis, dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara aktor negara, korporasi, dan masyarakat sipil.

Dalam kerangka governance global, negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan dalam pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi. Perusahaan multinasional dan aktor masyarakat sipil memiliki peran yang semakin besar dalam memengaruhi arah kebijakan dan praktik pembangunan. Hal ini menandakan adanya pergeseran dari model pemerintahan sentralistik menuju model tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), di mana kekuasaan tersebar dan negosiasi antar aktor menjadi penting.<sup>14</sup>

Dalam konsep “structural power”, yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki kekuatan struktural yang dapat menyaingi bahkan melebihi kekuasaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, hubungan antara negara dan korporasi tidak selalu bersifat subordinatif, tetapi sering kali simbiotik atau bahkan kompetitif, tergantung konteks dan kekuatan masing-masing.<sup>15</sup>

Dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan, Moon menyatakan bahwa CSR merupakan bentuk respons korporatif terhadap tekanan sosial, politik, dan institusional yang berkembang di lingkungan eksternal. CSR bukan hanya ekspresi moralitas perusahaan, tetapi juga strategi legitimasi sosial-politik, terutama di wilayah-wilayah yang sensitif secara ekologis atau sosial, seperti kawasan pertambangan.<sup>16</sup>

Di sisi lain, masyarakat sipil (*civil society*) juga memiliki posisi penting dalam teori ini. Masyarakat sipil bukan hanya penerima kebijakan atau program, melainkan juga aktor aktif yang mampu memengaruhi proses kebijakan melalui partisipasi, advokasi, dan mobilisasi sosial. Dalam konteks CSR, keterlibatan masyarakat

<sup>13</sup> Gunawan Sumoningrat: *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta, IDEA 1998), hal 146

<sup>14</sup> David Held: *Political Theory and the Modern State*, (Stanford University Press, 1989)

<sup>15</sup> Susan Strange: *The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy*, (Cambridge University Press, 1996)

<sup>16</sup> Jeremy Moon: “*The Social Responsibility of Business and New Governance*.” (*Government and Opposition*, 37(3) 2000), hal 385-408.

sangat krusial dalam memastikan bahwa program yang dijalankan perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan tidak sekadar simbolik (tokenistic).

Penelitian ini berupaya memahami implementasi CSR tidak hanya sebagai program sosial perusahaan, tetapi juga sebagai arena politik di mana berbagai kepentingan dinegosiasikan. Hal ini sangat relevan dalam kasus PT Vale Indonesia Tbk, yang beroperasi di sektor ekstraktif dan berada di wilayah dengan dinamika sosial-politik yang kompleks seperti Desa Soroako.

## **2.8 Kerangka Pikir**

Dalam memperdayakan Masyarakat lokal melalui Tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), Perusahaan harus memperhatikan beberapa aspek sosial dan budaya. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sendiri merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan dalam meningkatkan produktivitas ataupun peningkatan kesejahteraan Masyarakat lokal yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk serta mengetahui bagaimana respon Masyarakat terkait dengan program tersebut, maka ada beberapa teori yang digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk serta mengetahui bagaimana respon Masyarakat terdampak terhadap program tersebut yang menjadi variable penting untuk dilihat dari setiap aktivitas politik yang dilakukan.

## 2.9 Skema Kerangka Pikir

